

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Rembang

Gambaran umum menjelaskan informasi-informasi terkait dengan penelitian mengenai Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang. Dalam gambaran umum ini, tercakup keterangan mengenai luas dan wilayah administrasi Kabupaten Rembang, letak dan kondisi geografis, kondisi demografis, serta visi dan misi administrasi Kabupaten Rembang. Selain itu, dijelaskan mengenai tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi instansi yang bersangkutan, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

2.1.1 Luas dan Wilayah Administrasi

Secara geografis, Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah sebesar 101.408 hektar, yang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa, dan 7 kelurahan. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (10.715 hektar), sementara yang terkecil adalah Kecamatan Sluke (3.759 hektar). Kabupaten Rembang terletak di ujung timur Provinsi Jawa Tengah, di sepanjang Pantai Utara Jawa Tengah, dan memiliki batas-batas wilayah yang jelas. Batas wilayah Kabupaten sebelah utara adalah Laut Jawa. Batas sebelah selatan adalah Kabupaten Blora. Batas sebelah barat adalah Kabupaten Pati, dan batas sebelah timur adalah Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur.



Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Rembang
Sumber : Lampiran Perda Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021

2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Rembang merupakan kabupaten yang terletak di bagian paling timur Provinsi Jawa Tengah dan berada di sepanjang pantai utara wilayah tersebut. Secara geografis, Kabupaten Rembang terletak antara garis koordinat 6°30' - 7°06' Lintang Selatan dan 111°00' - 111°30' Bujur Timur. Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah mencapai 101.408 hektar, yang merupakan salah satu wilayah yang cukup luas dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayah Kabupaten Rembang, sekitar 46,39%, merupakan dataran rendah yang terletak di bagian utara, sementara bagian selatannya memiliki ketinggian yang lebih tinggi. Wilayah selatan memiliki ketinggian antara 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut (30,42% dari total wilayah Kabupaten Rembang), sementara sisanya memiliki ketinggian antara 0 hingga 25 meter serta 500 hingga 1.000 meter. Secara keseluruhan, wilayah Kabupaten Rembang yang memiliki kelerengan 0 hingga 2% seluas 45.205 hektar (46,58%), sedangkan 33.233 hektar (43,18%) memiliki kelerengan antara 2 hingga 15%. Wilayah perbukitan dan pegunungan dengan kelerengan 15

hingga 40% dan lebih dari 40% masing-masing mencakup 14,38% dan 4,86% dari total luas wilayah Kabupaten Rembang.

2.1.3 Kondisi Demografis Kabupaten Rembang

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), jumlah penduduk Kabupaten Rembang pada tahun 2024 tercatat sebanyak 665.501 jiwa, dengan rincian 334.294 jiwa laki-laki dan 331.207 jiwa perempuan.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2024

No	Nama kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Sumber	38.026
2.	Bulu	28.904
3.	Gunem	25.213
4.	Sale	39.862
5.	Sarang	63.900
6.	Sedan	57.984
7.	Pamotan	51.675
8.	Sulang	40.440
9.	Kaliori	44.005
10.	Rembang	93.237
11.	Pancur	31.976
12.	Kragan	67.497
13.	Sluke	30.579
14.	Lasem	52.203

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Rembang, 2024

2.2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 yang mengatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.



Gambar 2.2 Gedung DPUTARU Kabupaten Rembang

Sumber: dputaru.rembangkab.go.id

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik melalui penyediaan prasarana fisik di bidang pekerjaan umum, untuk meningkatkan kenyamanan,

keamanan, kemandirian, serta kesejahteraan masyarakat..

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang memiliki misi, sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sarana yang tersedia untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan kesinambungan dalam perencanaan program kerja dan kegiatan di bidang pekerjaan umum.
3. Berupaya mewujudkan prasarana jalan yang mantap untuk mendukung kelancaran serta perkembangan ekonomi dan pembangunan.
4. Mengoptimalkan penyediaan air irigasi untuk mendukung pengembangan pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan.
5. Melestarikan dan mengembangkan potensi sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air baku bagi pemukiman, industri, dan pertanian.
6. Meningkatkan pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan.
7. Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
8. Berupaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar merasa memiliki, menjaga, memelihara dan melestarikan prasarana fisik yang telah dibangun.

2.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang memiliki tugas

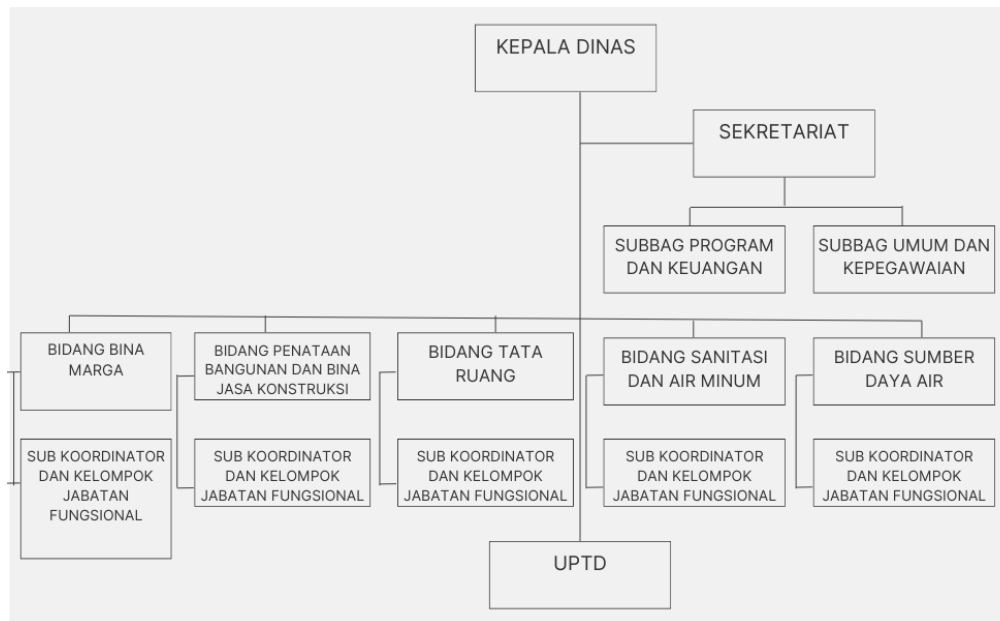
untuk mendukung bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang melaksanakan fungsinya, sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
3. Mengimplementasikan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
5. Menjalankan fungsi kesekretariatan dinas.
6. Mengendalikan penyelenggaraan tugas UPTD.
7. Menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.2.3 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang. Disusunlah Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang, sebagai berikut:



Gambar 2.3 Struktur Organisasi DPUTARU Kabupaten Rembang

Sumber: Peraturan Bupati Rembang No 65 Tahun 2021

Keterangan:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Bina Marga
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Tata Ruang
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Sanitasi dan Air Minum
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

7. Bidang Sumber Daya Air

a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

8. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)

2.2.4 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

No.	Jenis Kepegawaian	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	PNS	1. Magister (S2)	8
		2. Sarjana (S1)	24
		3. Diploma III	5
		4. SLTA/SMK	42
		5. SMP	6
		6. SD	4
2.	CPNS	1. Sarjana (S1)	6
3.	Pegawai Tidak Tetap	1. Sarjana (S1)	20
		2. Diploma IV	1
		3. Diploma III	1
		4. SLTA	64
		5. SLTP	14
		6. SD	7
Total			202 Orang

Sumber: Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber

Pada tabel 2.1 di atas menjelaskan bahwa jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang berdasarkan tingkat pendidikannya terbagi ke dalam tiga kategori kepegawaian, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan pegawai tidak tetap.

Pegawai dengan status PNS memiliki tingkat pendidikan tertinggi berupa Magister (S2) sebanyak 8 orang, diikuti oleh Sarjana (S1) sebanyak 24 orang,

Diploma III sebanyak 5 orang, SLTA/SMK sebanyak 42 orang, SMP sebanyak 6 orang, dan SD sebanyak 4 orang.

Sementara itu, CPNS dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1) berjumlah 6 orang. Adapun pegawai tidak tetap terdiri dari 20 orang berpendidikan Sarjana (S1), 1 orang berpendidikan Diploma IV, 1 orang berpendidikan Diploma III, 64 orang berpendidikan SLTA, 14 orang berpendidikan SLTP, dan 7 orang berpendidikan SD.

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Kepegawaian

No.	Jenis Kepegawaian	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	PNS	1. Golongan IV/c	1
		2. Golongan IV/b	1
		3. Golongan IV/a	5
		4. Golongan III/d	17
		5. Golongan III/c	4
		6. Golongan III/b	6
		7. Golongan III/a	9
		8. Golongan II/d	26
		9. Golongan II/c	11
		10. Golongan II/b	1
		11. Golongan II/a	3
		12. Golongan I/d	5
2.	CPNS	1. Golongan III/a	6
3.	Pegawai Tidak Tetap	-	107
Total			202 Orang

Sumber: Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber

Pada tabel 2.2 di atas menjelaskan bahwa jumlah pegawai berdasarkan kepegawaiannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Rembang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan pegawai tidak tetap.

Pegawai dengan status PNS terdiri dari berbagai golongan, yakni Golongan IV/c sebanyak 1 orang, Golongan IV/b sebanyak 1 orang, Golongan IV/a sejumlah 5 orang, Golongan III/d sebanyak 17 orang, Golongan III/c sebanyak 4 orang, Golongan III/b sebanyak 6 orang, Golongan III/a sebanyak 9 orang, Golongan II/d sebanyak 26 orang, Golongan II/c sebanyak 11 orang, Golongan II/b sebanyak 1 orang, Golongan II/a sebanyak 3 orang, dan Golongan I/d sebanyak 5 orang.

Sementara itu, CPNS berada pada Golongan III/a sejumlah 6 orang. Sedangkan pegawai tidak tetap, yang tidak memiliki klasifikasi golongan, berjumlah 107 orang.

2.2.6 Pelatihan dan Workshop yang Diikuti

Tabel 2.4 Daftar Pegawai yang Mengikuti Pelatihan dan *Workshop* DPUTARU Tahun 2023

No	Jabatan	Nama Pelatihan dan <i>Workshop</i>	Penyelenggara
1.	Sekretaris	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan VII	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
2.	Kasubbag Umpeg	Netralitas ASN dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
		Mental Sehat, ASN Tangguh dan Produktif	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
3.	Ketua Bidang Bina Marga	Pelatihan Kompetensi PPK Tipe C Model MOOC Batch 8 Tahun 2023	LKPP
4.	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Pelatihan Kompetensi PBJP untuk Pejabat Pengadaan Batch VIII Tahun 2023	LKPP
		Pelatihan Kompetensi PPK Tipe C model MOOC Batch 8 Tahun 2023	LKPP

No	Jabatan	Nama Pelatihan dan <i>Workshop</i>	Penyelenggara
5.	Pengelola Sistem Manajemen Jalan	Pelatihan Kompetensi PBJP untuk Pejabat Pengadaan Batch VIII Tahun 2023	LKPP
		Pelatihan Kompetensi PPK Tipe C model MOOC Batch 8 Tahun 2023	
6.	Analisis Jalan dan Jembatan	Pelatihan Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7.	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Gelombang I.	Pusat Pengembangan SDM Kemendagri Regional Yogyakarta
8.	Teknik Pengairan Ahli Muda	Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu / <i>Integrated Coastal Zone Management</i> Pelatihan Teknis	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
9.	Penata Ruang Ahli Muda	Kebijakan Jabatan Fungsional Penata Ruang Pasca Terbitnya PermenpanRB 1/2023 Tentang Jabatan Fungsional	PPSDM Kementerian ATR /BPN
10.	Penata Ruang Ahli Muda	Pelatihan Kompetensi PPK Tipe C model MOOC Batch 8 Tahun 2023	LKPP
11.	Pengelola Keuangan	Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Gelombang II	Pusat Pengembangan SDM Kemendagri Regional Yogyakarta
12.	Pengelola Kepegawaian	Webinar Teknik Penyusunan SOP	PITMA
13.	Penata Ruang Ahli Pertama	Penguatan Integrasi Agraria-Pertanahan dan Tata Ruang dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	PPSDM Kementerian ATR /BPN
		Kebijakan Jabatan Fungsional Penata Ruang Pasca Terbitnya PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.	PPSDM Kementerian ATR /BPN

Sumber: Laporan money pengembangan kompetensi DPUTARU Kab. Rembang Tahun 2023